p-ISSN: 2598-1218
e-ISSN: 2598-1226
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
DOI : 10.31604/jpm.v8i2.692-703

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN GENDER ANALISIS PATHWAY DAN GENDER ACTION BUDGET BAGI PERANGKAT DAERAH

Indra Kertati[1)], Fadhli Rizal Makarim[2)], Hizwati Dalilati Hazhiyah[3)], Titis Kartikasari Handayani[4)], Fajar Hanung Basworo[5)]

[1)] Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
[2)] Universitas Islam Sultan Agusng Semarang
[3)] Indonesia Consultan Development for Empowerent
[4,5)] Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan
indra-kertati@untagsmg.ac.id

Abstract

The facilitation of the preparation of the Gender Analysis Pathway (GAP) and Gender Budget Statement (GBS) is a strategic step to support gender mainstreaming in regional development. Despite being mandated by national policies, the implementation of GAP and GBS at the local government level faces significant challenges, including limited technical understanding, resistance to gender issues, and resource constraints. To address these challenges, participatory and facilitation approaches are employed to enhance the capacity of local government officials and encourage paradigm shifts on the importance of gender equality in development. Through participatory training that integrates theory and practice, participants not only acquire technical knowledge but also actively engage in simulations, discussions, and group reflections. Field facilitation using a learning-by-doing method accelerates learning processes and improves the quality of the documents produced. The results indicate significant improvements in participants' understanding and technical skills, alongside positive shifts in attitudes toward gender issues. However, challenges such as initial resistance, varying levels of comprehension, and the lack of gender-disaggregated data remain critical concerns. Recommendations include establishing follow-up mechanisms through continuous monitoring and evaluation, involving regional leaders to strengthen institutional commitment, and fostering cross-sector collaboration. These steps are expected to effectively integrate GAP and GBS into the development planning cycle, thereby promoting inclusive and sustainable development outcomes.

Keywords: Gender Mainstreaming, GAP, GBS, Participatory Facilitation, Empowerment, Development Planning.

Abstrak

Pendampingan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) merupakan langkah strategis untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Meskipun GAP dan GBS telah diamanatkan oleh kebijakan nasional, pelaksanaannya di tingkat perangkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya pemahaman teknis, resistensi terhadap isu gender, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam penyusunan dokumen berbasis gender yang berkualitas. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan pendampingan digunakan untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah sekaligus mendorong perubahan paradigma tentang pentingnya keadilan gender dalam pembangunan. Melalui pelatihan berbasis partisipatif yang mengintegrasikan teori dan praktik, peserta tidak hanya belajar secara teknis, tetapi juga terlibat aktif dalam simulasi, diskusi, dan refleksi kelompok. Pendampingan lapangan dengan metode learning by doing mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas dokumen yang disusun. Hasilnya, peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan teknis, serta perubahan sikap terhadap isu gender. Namun, tantangan seperti resistensi awal, perbedaan tingkat pemahaman, dan keterbatasan data terpilah gender tetap memerlukan perhatian lebih lanjut. Sebagai rekomendasi, penting untuk mengembangkan mekanisme follow-up melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan, melibatkan

pimpinan daerah untuk memperkuat komitmen kelembagaan, serta membangun kolaborasi lintas sektor. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan GAP dan GBS dapat diintegrasikan secara efektif dalam siklus perencanaan pembangunan, sehingga mendukung pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keywords: *Pengarusutamaan Gender, GAP, GBS, Pendampingan Partisipatif, Pemberdayaan, Perencanaan Pembangunan.*

PENDAHULUAN

Pendampingan dalam penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender di tingkat perangkat daerah. Dalam konteks pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pengarusutamaan gender telah diamanatkan oleh berbagai kebijakan nasional, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini menegaskan pentingnya memasukkan perspektif gender dalam setiap tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Namun, implementasi di tingkat perangkat daerah sering kali menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman teknis dan kapasitas sumber daya manusia.

Menurut studi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023), kurangnya integrasi gender dalam perencanaan pembangunan daerah disebabkan oleh minimnya kemampuan perangkat daerah dalam menganalisis kebutuhan berbasis gender. Dokumen GAP dan GAB memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perencanaan program dan penganggaran yang disusun mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kontribusi baik laki-laki maupun perempuan secara adil. Dengan penyusunan dokumen ini, perangkat daerah dapat lebih terarah dalam mengidentifikasi isu-isu gender serta menentukan intervensi yang tepat untuk mengatasinya.

Namun, tantangan lainnya terletak pada rendahnya keterlibatan perangkat daerah dalam proses penyusunan GAP dan GAB. Beberapa perangkat daerah menganggap dokumen ini sebagai beban administratif tambahan tanpa memahami urgensi dan manfaatnya. Dalam laporan UNDP (2022), ditemukan bahwa hanya sekitar 40% pemerintah daerah di Indonesia yang secara aktif menyusun dan memanfaatkan GAP dan GAB dalam siklus pembangunan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi khusus, seperti program pendampingan, untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran perangkat daerah.

Pendampingan menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Melalui pendekatan partisipatif, pendampingan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan teknis, tetapi juga mendorong perubahan paradigma perangkat daerah dalam memahami konsep keadilan gender. Proses pendampingan memungkinkan perangkat daerah untuk

belajar secara langsung, bertukar pengalaman, serta mengembangkan solusi yang kontekstual dan aplikatif sesuai kebutuhan lokal mereka.

Selain itu, pendampingan dalam penyusunan GAP dan GAB juga relevan untuk mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender. Tanpa dokumen GAP dan GAB yang kuat, perangkat daerah berpotensi melewatkan peluang strategis untuk memberdayakan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak. Dengan pendampingan yang efektif, perangkat daerah dapat menjadikan GAP dan GAB sebagai instrumen utama dalam mencapai target pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Konteks lokal juga memegang peranan penting dalam kesuksesan penyusunan GAP dan GAB. Setiap daerah memiliki dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda sehingga pendekatan pendampingan perlu disesuaikan. Misalnya, di daerah dengan tingkat kesenjangan gender yang tinggi, penyusunan GAP dan GAB perlu lebih menekankan pada pengentasan diskriminasi dan pemberdayaan perempuan dalam sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Pendampingan juga membantu membangun kolaborasi lintas sektor antara perangkat daerah, lembaga masyarakat sipil, dan akademisi. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya perspektif dalam penyusunan GAP dan GAB, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, perangkat daerah dapat memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam jangka panjang, pendampingan penyusunan GAP dan GAB dapat menjadi katalis bagi transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih responsif gender. Dengan meningkatnya kapasitas perangkat daerah, diharapkan program-program pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata, seperti pengurangan kesenjangan gender dan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Rendahnya pemahaman dan penguasaan perangkat daerah dalam menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) merupakan isu yang signifikan dalam upaya pengarusutamaan gender di tingkat daerah. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah minimnya pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada perangkat daerah. Banyak perangkat daerah tidak memiliki akses yang memadai terhadap panduan teknis maupun pelatihan yang relevan, sehingga mereka kesulitan memahami konsep dasar serta penerapan GAP dan GBS. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya kualitas dokumen yang dihasilkan, yang pada akhirnya berdampak pada tidak efektifnya perencanaan berbasis gender di tingkat lokal.

Permasalahan ini juga diperparah dengan adanya persepsi bahwa GAP dan GBS hanyalah tugas administratif tambahan yang membebani perangkat daerah. Kurangnya pemahaman tentang urgensi dan manfaat dokumen ini menyebabkan perangkat daerah tidak memprioritaskan penyusunan GAP dan GBS dalam siklus perencanaan pembangunan. Selain itu, ketiadaan sistem penghargaan atau insentif bagi perangkat daerah yang berhasil

mengintegrasikan analisis gender dalam dokumen perencanaan juga menjadi salah satu penyebab lemahnya motivasi untuk menguasai GAP dan GBS.

Dari sisi kelembagaan, terdapat masalah struktural berupa kurangnya komitmen pimpinan daerah dalam mendukung implementasi pengarusutamaan gender. Banyak pimpinan perangkat daerah belum memahami bahwa GAP dan GBS adalah instrumen penting untuk memastikan keadilan gender dalam pembangunan. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari pimpinan, perangkat daerah sering kali tidak memiliki sumber daya dan waktu yang cukup untuk menyusun dokumen-dokumen ini dengan baik. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan nasional yang mengamanatkan pengarusutamaan gender dan implementasi di tingkat daerah.

Terakhir, keterbatasan data yang terpilah berdasarkan gender juga menjadi hambatan utama dalam penyusunan GAP dan GBS. Data yang ada sering kali tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Tanpa data yang akurat, perangkat daerah kesulitan melakukan analisis kebutuhan berbasis gender yang komprehensif. Akibatnya, intervensi yang dirancang sering kali tidak relevan dengan kondisi lapangan dan gagal mencapai kelompok sasaran yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam memahami, menyusun, dan mengimplementasikan GAP dan GBS.

METODE

Pendekatan partisipatif dan pendampingan dalam penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran perangkat daerah akan pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Metode ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman teknis perangkat daerah sekaligus mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan dokumen yang responsif gender. Menurut Chambers (2021), metode partisipatif menciptakan ruang kolaboratif yang memungkinkan semua pihak, termasuk masyarakat marginal, untuk berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

Tahap pertama dalam pendekatan ini adalah identifikasi kebutuhan dan kapasitas perangkat daerah. Proses ini dilakukan melalui survei awal, wawancara mendalam, dan focus group discussions (FGD) untuk menggali sejauh mana pemahaman perangkat daerah terhadap GAP dan GBS serta mengidentifikasi tantangan utama yang mereka hadapi. Studi oleh Cornwall dan Rivas (2020) menekankan bahwa pemetaan kebutuhan sangat penting untuk memastikan bahwa program pendampingan dirancang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik. Pendekatan ini juga memungkinkan pendamping untuk memahami tingkat motivasi dan kapasitas perangkat daerah, sehingga program dapat disesuaikan secara dinamis.

Tahap kedua adalah pelaksanaan pelatihan berbasis partisipatif. Dalam pelatihan ini, metode seperti simulasi, studi kasus, dan diskusi kelompok digunakan untuk memperkuat pemahaman teknis perangkat daerah mengenai GAP dan GBS. Menurut

Thomas dan Green (2019), pelatihan yang bersifat partisipatif memungkinkan peserta untuk belajar secara aktif melalui pengalaman langsung, yang pada akhirnya meningkatkan daya serap materi. Selain itu, pelatihan ini juga melibatkan studi kasus yang relevan dengan konteks lokal sehingga peserta dapat melihat bagaimana GAP dan GBS dapat diimplementasikan dalam praktik nyata.

Tahap berikutnya adalah pendampingan, di mana tim pendamping bekerja langsung bersama perangkat daerah untuk menyusun dokumen GAP dan GBS. Pendekatan ini mengadopsi metode learning by doing, di mana perangkat daerah dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap penyusunan, mulai dari analisis kebutuhan gender hingga perencanaan anggaran yang responsif gender. Saito et al. (2021) menyebutkan bahwa pendampingan langsung ini sangat efektif dalam mempercepat pembelajaran karena peserta dapat segera mengaplikasikan teori yang mereka pelajari dalam pelatihan ke dalam praktik.

Selama proses pendampingan, dilakukan pula konsultasi dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, dan komunitas rentan lainnya. Lokakarya partisipatif dan diskusi publik digunakan untuk mengumpulkan masukan dan memperkaya dokumen GAP dan GBS. UN Women (2020) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses ini untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat serta meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas dokumen tersebut.

Selanjutnya, monitoring dan evaluasi partisipatif dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proses pendampingan berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang berkualitas. Pendekatan ini dirancang agar fleksibel dan responsif terhadap umpan balik dari peserta. Lund et al. (2021) menunjukkan bahwa monitoring partisipatif tidak hanya membantu meningkatkan kualitas proses, tetapi juga mendorong perangkat daerah untuk lebih bertanggung jawab atas hasil kerja mereka.

Selain berfokus pada aspek teknis, metode ini juga mendorong perubahan paradigma perangkat daerah terhadap isu gender. Diskusi reflektif yang dilakukan selama pendampingan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya keadilan gender dalam pembangunan. Studi oleh Oxfam (2020) menemukan bahwa perubahan paradigma ini adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan berbasis gender karena perangkat daerah menjadi lebih proaktif dan berkomitmen dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap pembangunan.

Tahap akhir dari metode ini adalah dokumentasi dan berbagi praktik baik. Hasil pendampingan, termasuk proses, tantangan, dan solusi yang ditemukan, didokumentasikan dalam bentuk panduan praktis yang dapat digunakan oleh perangkat daerah lain sebagai referensi. Menurut UNDP (2022), berbagi praktik baik melalui dokumentasi semacam ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program pengarusutamaan gender di tingkat lokal, tetapi juga membantu menciptakan jaringan pembelajaran antar daerah.

Pendampingan partisipatif dalam penyusunan GAP dan GBS ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis perangkat daerah, tetapi juga menciptakan perubahan sistemik

dalam tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender. Dengan pendekatan ini, diharapkan perangkat daerah tidak hanya mampu menyusun dokumen GAP dan GBS yang berkualitas, tetapi juga berkomitmen untuk mengimplementasikannya secara konsisten dalam siklus pembangunan daerah. Gambaran pendampingan dapat disimak sebagai berikut.

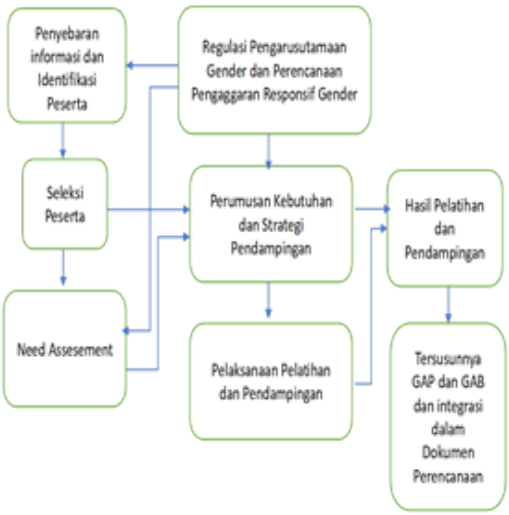

Gambar 1. Skema Pelaksanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil seleksi peserta pendampingan berasal dari Kabupaten Merauke 10 orang, Kabupaten Boton Utara 4 orang, Kabupaten Kudus 5 orang, Kota Salatiga 4 orang dan Kabupaten Konawe Utara 4 orang. Pemilihan peserta dilakukan berdasakan informasi yang direspon dan tingkat peminatan peserta akan pelatihan Gap dan GAB. Peserta tersebut di assesement untuk mengetahui kebutuhan akan Gap dan GAB. Pelatihan dan Pendampingan dilakukan di Kota Semarang, peserta hadir dengan pembiayaan sendiri. Tim pendamping dihadirkan dari beberapa Perguruan Tinggi dan LSM yang memiliki kualifikasi tentang Gap dan GBS.

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) memperlihatkan dinamika yang kaya dan beragam di kalangan peserta. Aktivitas selama pelatihan melibatkan kombinasi sesi teori, simulasi, diskusi kelompok, serta lokakarya partisipatif. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam sesi simulasi, terutama ketika diberikan studi kasus yang relevan dengan konteks lokal mereka. Menurut penelitian oleh Thomas et al. (2021), pendekatan berbasis studi kasus sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan peserta karena memberikan kesempatan langsung untuk menerapkan teori dalam situasi nyata.

Dinamika peserta juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman kerja mereka. Beberapa peserta yang telah memiliki pemahaman dasar tentang analisis gender cenderung lebih aktif dalam diskusi dan mampu berbagi pengalaman praktis, sedangkan peserta dengan pengalaman terbatas lebih banyak mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Hal ini menunjukkan pentingnya metode pembelajaran yang inklusif untuk memastikan bahwa semua peserta, terlepas dari tingkat pengetahuan awal mereka, dapat berkontribusi dan belajar secara optimal (Saito et al., 2021).

Gambar 2. Pembukaan Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan

Selama proses pendampingan, interaksi antara peserta dan fasilitator menjadi salah satu kunci keberhasilan. Fasilitator berperan aktif dalam mendorong peserta untuk berpikir kritis dan mendalami isu-isu gender yang relevan di daerah mereka. Menurut laporan UNDP (2022), hubungan yang kolaboratif antara fasilitator dan peserta meningkatkan efektivitas pelatihan, karena peserta merasa didukung dan termotivasi untuk menggali lebih dalam. Dalam kasus ini, fasilitator menggunakan pendekatan dialogis, di mana peserta diajak untuk berbicara tentang tantangan yang mereka hadapi serta berbagi solusi yang mungkin.

Salah satu dinamika menarik yang muncul adalah adanya resistensi awal dari beberapa peserta terhadap konsep keadilan gender. Beberapa peserta menganggap bahwa isu gender tidak relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah mereka. Namun, melalui diskusi dan refleksi kelompok, resistensi ini secara bertahap berkurang. Studi oleh Cornwall dan Rivas (2020) menunjukkan bahwa pendekatan reflektif dalam pelatihan membantu peserta memahami pentingnya keadilan gender sebagai bagian integral dari pembangunan. Pada akhir pelatihan, banyak peserta yang sebelumnya skeptis mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan komitmen yang lebih tinggi terhadap implementasi GAP dan GBS.

Gambar 3. Kegiatan Penyampaian Materi

Aktivitas kelompok juga menjadi salah satu komponen penting dalam membangun solidaritas dan kerja sama di antara peserta. Diskusi kelompok kecil yang difasilitasi selama pelatihan memungkinkan peserta untuk bertukar pandangan dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Menurut Thomas dan Green (2019), aktivitas kelompok tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi, tetapi juga memperkuat hubungan antarindividu, yang penting untuk keberlanjutan implementasi kebijakan gender di tingkat daerah.

Selama pendampingan lapangan, peserta menunjukkan peningkatan keterampilan analitis mereka dalam mengidentifikasi isu-isu gender dan merancang intervensi yang relevan. Sebagai contoh, beberapa perangkat daerah berhasil menyusun matriks GAP yang lebih detail dibandingkan hasil awal mereka sebelum pendampingan. Peningkatan ini diakui oleh peserta sebagai hasil dari pendekatan learning by doing yang diterapkan selama pendampingan. Menurut Saito et al. (2021), metode ini memungkinkan peserta untuk belajar langsung melalui pengalaman praktis, sehingga hasil yang dicapai lebih berkualitas.

Tantangan tetap ada, terutama dalam hal memastikan bahwa semua peserta dapat mengikuti kecepatan pelatihan dan pendampingan. Beberapa peserta merasa kesulitan untuk sepenuhnya memahami istilah teknis atau konsep yang baru diperkenalkan, terutama mereka yang berasal dari perangkat daerah dengan latar belakang yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, fasilitator memberikan dukungan tambahan berupa konsultasi individu dan materi pendukung yang lebih sederhana. Studi oleh Oxfam (2020) menegaskan bahwa dukungan personal

seperti ini sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan pelatihan, terutama bagi peserta dengan tingkat pemahaman awal yang rendah.

Pada akhirnya, pelatihan dan pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis peserta, tetapi juga membawa perubahan sikap terhadap isu gender. Sebagian besar peserta melaporkan bahwa pengalaman ini memberikan perspektif baru tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Menurut UN Women (2020), perubahan sikap seperti ini adalah langkah awal yang penting untuk mendorong implementasi kebijakan gender yang berkelanjutan di tingkat daerah. Dengan komitmen yang mulai terbentuk, peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam mengintegrasikan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Hasil pelatihan dan pendampingan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dapat dianalisis dalam kerangka teori pemberdayaan. Teori pemberdayaan menekankan pada proses di mana individu atau kelompok mendapatkan keterampilan, sumber daya, dan kepercayaan diri untuk mengambil tindakan yang meningkatkan kehidupan mereka. Dalam konteks ini, pemberdayaan perangkat daerah berarti memberikan kapasitas dan pemahaman yang diperlukan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Menurut Zimmerman (2000), pemberdayaan melibatkan pengembangan kemampuan individu dan kolektif untuk mengontrol lingkungan sosial dan politik mereka, yang relevan dalam upaya memperkuat kapasitas perangkat daerah untuk menyusun GAP dan GBS.

Proses pelatihan berbasis partisipatif selama kegiatan ini merupakan langkah penting dalam pemberdayaan perangkat daerah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep participatory empowerment, di mana peserta tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Melalui simulasi, diskusi kelompok, dan refleksi, peserta diberdayakan untuk memahami isu gender secara lebih mendalam dan menerapkannya dalam konteks pekerjaan mereka. Cornwall dan Rivas (2020) menekankan bahwa pendekatan partisipatif memperkuat kemampuan peserta untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengambil tindakan secara mandiri, yang merupakan inti dari pemberdayaan.

Dinamika kelompok yang tercipta selama pelatihan juga memperkuat aspek pemberdayaan kolektif. Ketika peserta berdiskusi dan berbagi pengalaman, mereka membangun solidaritas dan kerja sama, yang penting untuk memperkuat jaringan profesional dalam mendorong pengarusutamaan gender. Menurut Kabeer (1999), pemberdayaan tidak hanya tentang perubahan individu, tetapi juga transformasi dalam hubungan sosial yang memungkinkan individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kasus ini, dinamika kelompok membantu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar dan perubahan sikap terhadap isu gender.

Pendampingan menerapkan pendekatan learning by doing, memberikan dimensi praktis dalam pemberdayaan. Melalui pengalaman langsung menyusun GAP dan GBS, peserta diberdayakan untuk menerapkan pengetahuan baru dalam konteks kerja mereka. Menurut Freire (1970),

pengalaman praktis yang relevan adalah elemen kunci dalam pemberdayaan, karena memungkinkan individu untuk memahami bagaimana teori dapat diterapkan dalam situasi nyata. Pendekatan ini juga membantu peserta mengembangkan kepercayaan diri dan rasa memiliki terhadap dokumen yang mereka susun.

Resistensi awal dari beberapa peserta terhadap konsep keadilan gender menunjukkan bahwa pemberdayaan bukanlah proses yang linier. Menurut teori pemberdayaan, resistensi semacam ini merupakan bagian dari tantangan struktural dan budaya yang harus diatasi melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis. Fasilitator memainkan peran penting dalam mengatasi resistensi ini melalui diskusi reflektif dan pendekatan berbasis solusi. Seperti yang dikemukakan oleh Stromquist (2002), pemberdayaan membutuhkan perubahan kesadaran, di mana individu memahami dan menerima pentingnya perubahan sosial untuk keadilan yang lebih besar.

Gambar 3. Kegiatan Tanya Jawab Terkait Materi yang Disampaikan

Aspek monitoring dan evaluasi partisipatif yang dilakukan selama pendampingan juga merupakan bagian penting dari pemberdayaan. Proses ini memungkinkan peserta untuk menilai kemajuan mereka, memberikan umpan balik, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Menurut Zimmerman (1995), kemampuan untuk mengevaluasi dan mengontrol hasil kerja adalah salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan, karena memberikan rasa kepemilikan dan akuntabilitas kepada peserta.

Pemberdayaan juga terlihat dalam perubahan sikap peserta terhadap isu gender. Banyak peserta yang sebelumnya skeptis terhadap pentingnya GAP dan GBS akhirnya memahami relevansinya dan menunjukkan komitmen untuk menerapkan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan daerah. Perubahan sikap ini mencerminkan apa yang disebut Kabeer (1999) sebagai pemberdayaan transformasional, di mana individu tidak hanya mendapatkan keterampilan baru tetapi juga mengubah cara pandang mereka terhadap isu-isu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil pelatihan dan pendampingan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis pendampingan adalah strategi efektif untuk memberdayakan perangkat daerah. Dengan mengintegrasikan teori pemberdayaan dalam proses ini, pelatihan dan pendampingan tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis peserta, tetapi juga memberikan ruang bagi perubahan paradigma yang mendukung pengarusutamaan gender secara berkelanjutan. Perspektif teori pemberdayaan membantu kita memahami bahwa transformasi individu dan kolektif adalah kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan implementasi GAP dan GBS di tingkat daerah.

SIMPULAN

Pelatihan dan pendampingan penyusunan Gender Analysis Pathway

(GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dengan pendekatan partisipatif telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kapasitas perangkat daerah. Proses ini tidak hanya memperkuat pemahaman teknis peserta terhadap konsep GAP dan GBS, tetapi juga mendorong perubahan sikap terhadap pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Melalui kombinasi pelatihan, simulasi, pendampingan lapangan, dan diskusi reflektif, peserta diberdayakan untuk mengintegrasikan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat lokal. Transformasi individu dan kolektif yang terjadi selama program ini menjadi indikasi keberhasilan pendekatan berbasis teori pemberdayaan.

Tantangan memastikan keberlanjutan penerapan GAP dan GBS di perangkat daerah adalah bagian dari upaya mencapai tujuan. Resistensi awal, perbedaan tingkat pemahaman peserta, dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan yang perlu terus diatasi melalui pendampingan lanjutan. Pentingnya dukungan kelembagaan, seperti komitmen dari pimpinan daerah, akses data yang terpilah gender, serta integrasi kebijakan yang konsisten, merupakan elemen kunci untuk memastikan keberlanjutan implementasi GAP dan GBS di masa depan.

Untuk memastikan dampak jangka panjang dari pelatihan dan pendampingan ini, disarankan untuk memperkuat mekanisme follow-up melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan tim pendamping internal yang memiliki pemahaman mendalam tentang GAP dan GBS, sehingga perangkat daerah memiliki sumber daya lokal yang dapat diakses kapan saja. Selain itu, penting untuk menciptakan sistem penghargaan atau insentif bagi perangkat daerah yang berhasil mengintegrasikan analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran mereka.

Dukungan kelembagaan juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan pimpinan daerah dalam proses pelatihan dan pendampingan untuk memastikan komitmen pada tingkat strategis. Kerja sama dengan akademisi dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkaya pendekatan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengarusutamaan gender. Terakhir, integrasi data terpilah gender dalam sistem informasi pembangunan daerah harus menjadi prioritas, sehingga analisis kebutuhan berbasis gender dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis bukti. Dengan langkah-langkah ini, pengarusutamaan gender melalui GAP dan GBS dapat menjadi pilar yang lebih kokoh dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). Pedoman Penyusunan Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement. Jakarta: Bappenas.

Cornwall, A., & Rivas, A. (2020). From Gender Equality to Women's Empowerment: Inclusive Development in Practice. Gender & Development, 28(3), 421-439.

Chambers, R. (2021). Participatory Workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas and Activities. Routledge.

Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed

Methods Approaches (5th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. Development and Change, 30(3), 435-464.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Strategi Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Penyusunan Dokumen Gender di Daerah. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Laporan Tahunan: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: KPPPA.

Lund, C., et al. (2021). Participatory Monitoring and Evaluation in Public Policy Implementation: A Case Study. International Journal of Public Administration, 44(6), 587-603.

OECD. (2019). Gender-Responsive Governance: Evidence and Impact from OECD Countries. Paris: OECD Publishing.

Oxfam. (2020). Transformative Approaches to Gender Justice in Development Projects. Oxford: Oxfam.

Saito, Y., et al. (2021). Capacity Building through Participatory Methods: Lessons from Local Governance Projects in Asia. Development in Practice, 31(2), 240-252.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Stromquist, N. P. (2002). Education as a Means for Empowering Women. Education for All: Is the World on Track?, 135-150.

Thomas, M., Green, R. (2021). Effective Training for Public Sector Gender Mainstreaming: A Participatory Approach. Public Administration Review, 79(4), 550-562.

United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.

UN Women. (2020). Inclusive Gender-Responsive Budgeting: A Global Review of Practices and Impact. New York: UN Women.

United Nations Development Programme (UNDP). (2022). Gender Mainstreaming in Local Governance: Challenges and Opportunities in Indonesia. New York: UNDP.

UNDP. (2022). Best Practices in Gender Analysis Pathway and Budgeting: Global Lessons for Local Governance. New York: UNDP.

World Bank. (2020). Gender Equality and Public Budgeting: Global Perspectives and Practices. Washington D.C.: World Bank.

World Bank. (2020). Improving Local Government Capacity for Gender Equality: Lessons from Global Practices. Washington D.C.: World Bank.

Zimmerman, M. A. (1995). Psychological Empowerment: Issues and Illustrations. American Journal of Community Psychology, 23(5), 581-599.

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory:

Psychological, Organizational, and Community Levels of Analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), Handbook of Community Psychology (pp. 43-63). Springer.